

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparaturnya lainnya, Penyelenggaraan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Instansi pemerintah adalah organisasi yang merupakan kumpulan orang-orang yang dipilih secara khusus untuk melaksanakan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil unsur yang berkedudukan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, dan merata. Pegawai Negeri Sipil harus bersifat netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam sebuah organisasi potensi Sumber Daya Manusia bisa dikatakan sebagai sumber daya utama karena dapat mengolah, menganalisis, dan menggerakkan tujuan instansi secara efektif dan efisien. Peran manusia dalam instansi sebagai pegawai merupakan faktor penting dalam setiap instansi, yang menjadi pen ggerak dan penentu jalannya organisasi. Faktor sumber daya manusia ini merupakan elemen yang harus diperhatikan oleh setiap instansi, termasuk pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Pati. Instansi harus dapat bekerja dengan lebih efektif, efisien dan produktif. Jadi manusia dapat dipandang sebagai faktor penentu, karena ditangan manusia segala inovasi akan direalisasi dalam upaya mewujudkan tujuan instansi pemerintah.

Adapun visi dari Satpol PP di Kabupaten Pati adalah “Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah, Perlindungan Masyarakat Serta Menciptakan Rasa Aman Terhadap Ancaman Bahaya Bencana

Kebakaran Bagi Masyarakat Kabupaten Pati ”. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP di Kabupaten Pati didukung oleh 4 sub bagian yang terdiri dari staff TU, PPHD (Penegakan Peraturan Hukum Daerah), Damkar Satlinmas (Pemadam Kebakaran Satuan Perlindungan Masyarakat), dan Tribumtranmas (Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat).

Tugas di Bagian Satpol PP meliputi :

1. Staff Tata Usaha bertugas mengurus kebutuhan kantor mulai dari listrik, telepon, air, makan minum saat rapat, proses perjalanan dinas, mengirim dan menerima surat.
2. PPHD (Penegakan Peraturan Hukum Daerah) bertugas mengurus, menegakkan hukum daerah.
3. Damkar Satlinmas (Pemadam Kebakaran dan Satuan Perlindungan Masyarakat) bertugas :
  - a. penyelenggaraan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
  - b. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran, penyelenggaraan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
  - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah,
  - d. Penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran di Daerah,
  - e. Penyelenggaraan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta dengan Intelijen Daerah, Penyelenggaraan pengawasan terhadap masyarakat , aparatur

atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi mendukung kinerja organisasi.

4. Tribumtranmas (Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat) bertugas patroli dalam rangka menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta pengamanan obyek vital dan pengawalan pejabat negara.

Namun dalam menjalankan tugasnya Satpol PP masih mengalami kendala, diantaranya sistem yang dalam melakukan perekrutan masih manual. Sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui jika Satpol PP membuka lowongan tenaga kerja.

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan sebuah sistem yang mampu diakses secara universal oleh pihak instansi. Dan penulis mengambil judul “Sistem Informasi Satpol PP di Kabupaten Pati”.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan masalah yang diangkat pada latar belakang di atas, maka masalah yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang Sistem Informasi Satpol PP di Kabupaten Pati?
2. Bagaimana mengimplementasikan desain aplikasi Sistem Informasi Satpol PP di Kabupaten Pati menjadi sistem berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan bahasa pemrograman database *MySQL* ?

### **1.3. Batasan Masalah**

Penulisan Proposal Skripsi ini agar lebih berfokus dan terarah maka akan diberikan batasan terhadap Sistem Informasi Satpol PP di Kabupaten Pati yang akan dibahas, antara lain membangun Aplikasi Sistem Informasi Satpol PP berbasis web yang mencakup :

1. Pengumuman rekrutmen, calon mendaftar, administrasi pendaftaran, seleksi berkas, seleksi tes.
2. Report pegawai baru.

#### **1.4. Tujuan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Merancang dan membangun Sistem Informasi Satpol PP di Kabupaten Pati.
2. Mengimplementasikan Sistem Informasi Satpol PP di Kabupaten Pati.

#### **1.5. Manfaat**

Adapun manfaat dibangunnya Sistem Informasi Satpol PP di Kabupaten Pati diantaranya:

1. Bagi mahasiswa antara lain mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa dalam pembuatan sistem informasi, meningkatkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam membuat suatu sistem aplikasi terutama dalam hal ini adalah sistem informasi satpol pp di kabupaten pati, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami bahasa pemrograman terutama *PHP* dan basis data *MySQL* yang dapat diterapkan langsung dengan mengembangkan aplikasi berbasis *web*.
2. Bagi Instansi Pemerintah yaitu untuk mempermudah anggota Satpol PP dalam perekrutan tenaga baru.